

Receive : 13 May 2026

Revised : 04 June 2026

Accepted : 12 June 2026

Jurnal ADMINISTRATOR

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v8i1.122

Vol. 8 No. 1 June 2026, Hlm. 96-105



Implementasi Program Bantuan Sosial Dan Dana Desa Di Wilayah Lokal (Studi Pada Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi)

***Fachrul Reza¹, Andi Hikmawati Yunus², Fitri Sholihin³, Melcian Febrilia Pagalu⁴,
Siti Raodha Muttalib⁵, Dwi Maya Loka ZM⁶**

E-Mail : rezadakwah123@gmail.com*

Universitas Tadulako^{1,2,3,4,5,6}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program bantuan sosial dan dana desa di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, menggunakan model implementasi kebijakan Edward III. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teknik Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bantuan sosial dan dana desa masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Upaya sinergi antar pemangku kebijakan, peningkatan kapasitas aparatur desa, keterlibatan masyarakat, serta transparansi pengelolaan dana sangat diperlukan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan yang relevan dalam pengelolaan bantuan sosial dan dana desa di daerah lokal.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Bantuan Sosial, Dana Desa

Receive : 13 May 2026

Revised : 04 June 2026

Accepted : 12 June 2026

Jurnal ADMINISTRATOR

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v8i1.122

Vol. 8 No. 1 June 2026, Hlm. 96-105



ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of social assistance and village fund programs in Bora Village, Sigi Biromaru District, Sigi Regency, using the Edward III policy implementation model. This study employed a qualitative descriptive method, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted using the Miles, Huberman, and Saldana techniques. The results indicate that the implementation of social assistance and village funds still faces various obstacles, particularly in communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Synergy efforts among policymakers, capacity building of village officials, community involvement, and transparency in fund management are essential for optimal program achievement. The implications of this study are expected to provide relevant policy recommendations for the management of social assistance and village funds in local areas.

Keywords: *Policy Implementation, Social Assistance, Village Funds*

LATAR BELAKANG

Pemberian bantuan sosial dan dana desa merupakan strategi utama pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan di tingkat lokal. Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi dana desa semakin mendapatkan perhatian besar, dengan harapan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di wilayah pedesaan (Kemendagri, 2018). Pemerintah juga menggelontorkan berbagai bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai upaya responsif terhadap kemiskinan, terutama di masa pandemi COVID-19 (Santoso & Priyatna, 2021).

Dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan bantuan sosial dan dana desa di tingkat akar rumput kerap menemui persoalan, mulai dari kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap substansi kebijakan hingga kendala pendataan penerima manfaat (Widianto, 2020). Studi di beberapa wilayah menunjukkan inefisiensi administrasi dan ketidakmerataan distribusi bantuan menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian (Rihardi & Ellya, 2022). Hal ini sejalan dengan temuan BPKP (2022) yang mengindikasikan adanya data ganda dan ketidaktepatan sasaran penerima.

Desa Bora di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, menjadi salah satu contoh wilayah yang penuh dinamika kebijakan akibat karakteristik sosiogeografis, tingkat pendidikan, serta tingkat partisipasi warga yang bervariasi. Program-program bantuan sosial serta pengelolaan dana desa di Desa Bora telah berjalan beberapa tahun, namun hasil pembangunan dan jaminan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya optimal sesuai indikator pemerintah daerah (Dinsos Sigi, 2022).

Model implementasi Edward III (Edwards, 1980) menawarkan kerangka analisis penting untuk memahami faktor-faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Model ini menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, yang kesemuanya sangat relevan untuk diteliti dalam konteks kebijakan bantuan sosial di desa (Solichin, 2016).

Pada ranah komunikasi, salah satu masalah yang sering muncul adalah keterbatasan informasi dari pemerintah pusat ke pemerintah desa dan masyarakat. Penyampaian informasi secara berjenjang kerap menyebabkan distorsi pesan dan kurang terserapnya aturan pelaksanaan (Astuti & Permana, 2019). Akibatnya, masyarakat sering salah persepsi terkait syarat dan prosedur penerimaan bantuan.

Aspek sumber daya menjadi tantangan karena keterbatasan kapasitas aparatur desa, baik dari segi pendidikan maupun keterampilan teknis, yang berdampak pada akurasi pendataan hingga pelaporan penggunaan dana. Selain sumber daya manusia, infrastruktur pendukung seperti jaringan internet juga kadang tidak memadai untuk menunjang sistem pelaporan dan monitoring bantuan sosial (Wahyuni, 2019).

Disposisi atau sikap pelaksana program menjadi aspek yang tak kalah penting. Komitmen dan kejujuran aparatur desa menghadapi ujian di tengah tekanan sosial dan potensi konflik kepentingan, seperti nepotisme dalam penentuan penerima bantuan (Yuliani, 2021). Sikap positif sangat diperlukan agar pelaksanaan berjalan objektif, akuntabel, dan berintegritas.

Faktor struktur birokrasi menyangkut regulasi, prosedur operasional standar, serta pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah desa dengan lembaga terkait. Tumpang tindih regulasi dan minimnya mekanisme pengawasan internal seringkali menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan dana atau ketidakkonsistenan pelaksanaan program (Putra & Handayani, 2020).

Implikasi dari ketidaksempurnaan implementasi program bantuan sosial dan dana desa di wilayah Desa Bora antara lain adalah munculnya

ketidakpuasan warga, tingkat partisipasi yang menurun, serta potensi konflik horizontal di masyarakat (Rohman, 2021). Akuntabilitas dan transparansi menjadi tuntutan utama bagi pemerintah desa dalam tata kelola dana dan pelaporan program.

Penelitian tentang implementasi kebijakan di tingkat lokal, khususnya tentang bantuan sosial dan dana desa di Desa Bora, menjadi penting untuk mengetahui secara empiris kendala-kendala aktual yang dihadapi lapangan, sehingga solusi yang ditawarkan tidak sekadar normatif, melainkan kontekstual dan aplikatif. Studi serupa dilakukan oleh Rahmadani (2022) yang menyoroti disparitas antar desa dalam mengelola program akibat perbedaan kapasitas sumber daya dan sosial budaya.

Berbagai program pelatihan, penguatan kapasitas staf desa, hingga digitalisasi sistem pengelolaan dana telah dilakukan oleh Pemda Sigi, namun hasil yang diperoleh masih belum maksimal. Hal ini menandakan perlunya evaluasi komprehensif terhadap proses implementasi dan peningkatan sinergi lintas pihak (Setiawan, 2022).

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi program bantuan sosial dan dana desa di Desa Bora dengan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru dan rekomendasi praktis yang dapat

diadopsi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam pengelolaan bantuan sosial dan dana desa secara efektif dan akuntabel.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang pelaksanaan program bantuan sosial dan dana desa di Desa Bora. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan secara komprehensif fenomena yang terjadi serta mengungkap berbagai faktor pendukung maupun penghambat implementasi kebijakan (Creswell & Poth, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, dan masyarakat penerima manfaat, agar diperoleh data yang holistik mengenai persepsi, sikap, serta dinamika yang melatarbelakangi pelaksanaan kebijakan. Observasi langsung dilakukan dengan terjun ke lapangan untuk mengamati proses pendataan hingga pelaksanaan distribusi bantuan dan dana desa, serta dokumentasi terhadap data-data administratif program (Sugiyono, 2016).

Analisis data dilakukan melalui model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan

verifikasi kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan seleksi dan fokus pada informasi yang relevan seperti kendala dalam setiap aspek model Edward III, penyajian data dilakukan melalui tabulasi data, dan penarikan kesimpulan didasarkan pada temuan empiris dan literatur yang mendukungnya.

Untuk menjamin validitas data, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi. Penulis juga melakukan member check dengan narasumber untuk mengonfirmasi hasil temuan dan mengurangi bias subjektif. Literatur dan kebijakan nasional maupun daerah juga digunakan untuk menguatkan hasil analisis.

Adapun sumber data penelitian terdiri dari data primer yakni hasil wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen resmi Desa Bora, laporan penggunaan dana desa, dan kebijakan terkait bantuan sosial.

PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Dalam implementasi kebijakan, komunikasi menjadi faktor vital untuk memastikan pemahaman yang utuh mengenai kebijakan kepada seluruh stakeholder (Edwards, 1980). Di Desa Bora, komunikasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat sampai desa masih sering mengalami kendala, seperti keterlambatan informasi atau instruksi

yang tidak jelas. Banyak aparat desa yang mengaku belum memahami sepenuhnya juklak dan juknis program bantuan sosial dan dana desa karena adanya perubahan regulasi secara periodik tanpa sosialisasi yang memadai (Astuti & Permana, 2019). Saluran komunikasi yang digunakan pemerintah desa lebih sering bersifat konvensional, seperti pertemuan warga dan penyampaian dari mulut ke mulut, menyebabkan informasi tidak merata ke seluruh masyarakat (Wahyuni, 2019).

Belum adanya sistem informasi desa yang terintegrasi menyebabkan keterlambatan update jika ada perubahan atau kebijakan baru dari pemerintah pusat, terutama pada masa pandemi (Setiawan, 2022). Miskomunikasi kadang menimbulkan persepsi salah di masyarakat, seperti anggapan bahwa bantuan sosial bersifat permanen dan cenderung menjadi stimulus kemalasan pada sebagian penerima (Rahmadani, 2022). Penyampaian informasi yang tidak efektif juga memperbesar potensi kecemburuan sosial antar warga akibat ketidakjelasan kriteria penerima manfaat (Rihardi & Ellya, 2022).

Wawancara dengan kepala desa menunjukkan upaya sosialisasi intensif sering terganjal minimnya partisipasi masyarakat, terutama kelompok rentan yang kurang literasi digital. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan informasi dari tokoh masyarakat atau

perangkat desa, yang kadang kurang up-to-date terhadap perubahan regulasi pusat. Kurangnya penggunaan media sosial dan digitalisasi informasi desa menyebabkan jarak informasi, padahal sebagian kelompok muda sudah mulai memanfaatkan internet. Perlunya pelatihan komunikasi efektif dan digitalisasi sistem informasi desa agar arus informasi berjalan dua arah, sehingga masyarakat dapat memberi umpan balik atas pelaksanaan program (Widianto, 2020).

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia di Desa Bora masih terbatas, terutama dari segi jumlah dan kompetensi teknis dalam mengelola dana desa serta program bantuan sosial (Yuliani, 2021). Beberapa perangkat desa merangkap lebih dari satu jabatan sehingga beban kerja menjadi tinggi dan efektivitas pelaksanaan program terganggu (Putra & Handayani, 2020). Fasilitas pendukung seperti perangkat komputer, jaringan internet, dan ruang kerja yang layak seringkali belum memadai, menghambat proses pelaporan dan administrasi.

Pelatihan terhadap aparat desa masih sangat terbatas dan cenderung bersifat formalitas, sehingga belum meningkatkan keterampilan teknis secara signifikan. Pendamping desa yang bertugas mendampingi pengelolaan dana desa kadang belum sepenuhnya memahami kondisi spesifik

Desa Bora, sehingga advis yang diberikan kurang tepat guna.

Sumber daya keuangan kadang mengalami keterlambatan penyaluran dari pemerintah pusat dan daerah, sehingga pelaksanaan program tidak sesuai dengan timeline yang ditetapkan (Dinsos Sigi, 2022). Sistem reward and punishment bagi pelaksana program belum berjalan optimal, menyebabkan motivasi aparatur dalam bekerja hanya sekadar menjalankan tugas tanpa inovasi berarti. Minimnya tenaga admin atau operator desa berdampak pada akurasi pendataan warga penerima manfaat dan validitas pelaporan. Kurangnya sinergi dengan pihak ketiga, seperti LSM atau universitas, menyebabkan tidak adanya transfer pengetahuan baru dalam manajemen bantuan sosial dan dana desa.

Peningkatan kapasitas sumber daya desa perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan periodik dan pendampingan intensif dari berbagai stakeholder.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap pelaksana program sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan bantuan sosial dan dana desa (Solichin, 2016). Di Desa Bora, komitmen dan kejujuran perangkat desa dalam menyalurkan bantuan relatif baik, meski masih ada tekanan dari lingkungan sosial untuk mengutamakan keluarga atau kerabat. Transparansi pelaksanaan

program mulai diterapkan dengan mengumumkan nama penerima bantuan melalui papan informasi desa, namun belum semua pihak merasa puas (Rohman, 2021). Sebagian kecil perangkat desa masih terpengaruh budaya patronase dan nepotisme, walaupun telah ada himbauan dari kepala desa untuk menghindari praktik tersebut.

Atribut etika kerja seperti disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial menjadi nilai tambah yang harus terus diperkuat melalui sosialisasi internal perangkat desa. Temuan lapangan menunjukkan adanya variasi sikap pelaksana dalam memahami substansi program, dari yang benar-benar proaktif mengadvokasi warga hingga yang cenderung pasif menunggu instruksi. Penerapan reward system seperti penghargaan kepada aparat yang inovatif dinilai dapat memicu semangat dan inisiatif dalam memperbaiki pelayanan terhadap warga. Keterbatasan dalam memahami tujuan program kadang membuat sebagian pelaksana hanya berfokus pada pelaksanaan administratif semata tanpa memikirkan dampak sosialnya (Santoso & Priyatna, 2021). Sikap responsif terhadap keluhan warga masih kurang, seringkali aduan masyarakat tidak langsung ditindaklanjuti karena alasan prosedural. Perlunya penguatan integritas dan komitmen sosial pada setiap tahap implementasi melalui

pembinaan dan pengawasan ketat dari lembaga pengawas eksternal maupun internal desa.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di tingkat desa mencakup perangkat desa, BPD, serta pendamping desa yang memiliki kewenangan berbeda dalam tata kelola bantuan sosial dan dana desa (Kemendagri, 2018). Mekanisme pengambilan keputusan masih cenderung top-down, sering mengabaikan masukan dari masyarakat atau kelompok rentan, padahal partisipasi publik sangat diperlukan (Rahmadani, 2022).

SOP (Standard Operating Procedure) pelaksanaan bantuan sosial dan dana desa sudah tersedia, tetapi implementasinya kadang tidak konsisten akibat interpretasi yang berbeda antar pelaksana (Widianto, 2020). Minimnya pembagian tugas yang jelas menyebabkan tumpang tindih pekerjaan, sehingga proses pelaporan dan evaluasi sering kali terlambat. Sistem pengawasan dan audit internal dari BPD belum berjalan optimal, meskipun regulasinya telah mengharuskan laporan berkala dan keterbukaan informasi.

Komunikasi horizontal antar unit dalam pemerintahan desa masih terbatas, sehingga kerja tim tidak terkoordinasi dengan baik. Ketidakjelasan alur birokrasi dalam

permohonan bantuan menyebabkan kebingungan bagi masyarakat terutama kelompok rentan. Rendahnya dukungan teknologi informasi dalam manajemen birokrasi desa menghambat upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program (Setiawan, 2022). Selain itu, adanya dualisme kelembagaan antara pemerintah desa dan lembaga adat juga berpotensi menimbulkan konflik wewenang. Penyederhanaan struktur birokrasi dan digitalisasi tata kelola secara bertahap diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan bantuan sosial serta dana desa di Desa Bora.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi program bantuan sosial dan dana desa di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dipengaruhi secara signifikan oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagaimana diuraikan dalam model Edward III. Kendala utama ditemukan pada kurangnya sosialisasi yang efektif, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur, serta belum optimalnya sistem administrasi dan pengawasan internal desa.

Partisipasi masyarakat masih harus diperkuat terutama melalui inovasi

komunikasi digital dan pelibatan kelompok rentan agar distribusi manfaat program lebih merata. Penguatan integritas, peningkatan keterampilan aparatur desa, serta penyederhanaan birokrasi dan sistem pengawasan merupakan langkah strategis untuk mendorong efektivitas implementasi kebijakan. Kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah desa, pemerintah daerah, pendamping desa, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas serta keberlanjutan program.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program bantuan sosial dan dana desa pada tingkat lokal yang lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, W., & Permana, I. (2019). Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Berbasis Data. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 101-115.
- BPKP. (2022). Laporan Audit Pengelolaan Dana Desa. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dinsos Sigi. (2022). Laporan Tahunan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kabupaten Sigi. Dinas Sosial Kabupaten Sigi.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Kemendagri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kementerian Dalam Negeri RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Putra, F., & Handayani, T. (2020). Tantangan Implementasi Dana Desa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 17(1), 55-67.
- Rahmadani, D. (2022). Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 16(2), 77-88.
- Rihardi, H., & Ellya, D. (2022). Analisis Efektivitas Bantuan Sosial di Wilayah Tertinggal. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 20(2), 129-143.
- Rohman, A. (2021). Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 12(1), 39-50.
- Santoso, S., & Priyatna, A. (2021). Dampak Bantuan Langsung Tunai selama Pandemi terhadap Ekonomi

Receive : 13 May 2026

Revised : 04 June 2026

Accepted : 12 June 2026

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v8i1.122

- Desa. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 8(1), 21-34.
- Setiawan, B. (2022). Digitalisasi Pengelolaan Dana Desa: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Administrasi Digital*, 2(3), 44-58.
- Solichin, A. (2016). Model Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 18-28.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, E. (2019). Pengaruh Infrastruktur Teknologi Informasi terhadap Pelayanan Publik Desa. *Jurnal Informasi dan Komunikasi*, 8(2), 234-246.
- Widianto, A. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 97-115.
- Yuliani, N. (2021). Praktik Nepotisme dalam Penyaluran Bantuan Sosial. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 9(3), 143-155.